

## Kapolri Jenderal Sutanto:

# POLRI HARUS TINGKATKAN PENEGAKAN HUKUM

**JAMINAN kepastian hukum akan berdampak positif terhadap iklim usaha kondusif yang dapat merangsang para pemilik modal, baik dari dalam negeri maupun luar negeri untuk berinvestasi di Indonesia. Bahkan jaminan kepastian hukum juga berdampak pada membaiknya situasi di bidang politik, budaya dan keamanan.**

**D**ISAMPING itu, kepastian hukum merupakan suatu kondisi yang sangat didambakan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Karena secara tidak langsung, kepastian hukum akan dapat mendorong terwujudnya situasi kemandirian yang kondusif serta terwujudnya ketertiban di tengah-tengah masyarakat.

Guna mewujudkan kepastian hukum di Indonesia, seluruh jajaran kepolisian tentu harus lebih meningkatkan tekad dan komitmen penegakan hukum secara tegas, obyektif dan transparan tanpa

mengesampingkan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan.

"Dengan adanya penegakan hukum yang tegas, obyektif dan transparan, maka tidak akan membebaskan ruang gerak bagi para pelanggar hukum untuk bermain-main dengan hukum, meskipun mereka berusaha dengan segala macam cara mempengaruhi keteguhan para aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya," kata Kapolri Jenderal Sutanto saat membuka Rakernis Reserse di Jakarta.

Dikatakan, gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (Kantimbas) kedepan memang tidaklah ringan sebagaimana fakta yang terjadi dalam kehidupan sosial belakangan ini. Bahkan, adanya upaya kelompok tertentu yang ingin memecah belah NKRI dengan melakukan kegiatan-kegiatan yang provokatif serta upaya separatis akan berpengaruh terhadap kemandirian dalam negeri (Kamdagri).

Beberapa kejadian unjuk rasa yang bersikap anarkis dan menimbulkan jatuhnya korban jiwa, baik dari pihak masyarakat maupun dari pihak kepolisian seperti kejadian di Abepura, Papua menunjukkan

bahwa telah terjadi pergeseran sikap dan perilaku masyarakat Indonesia.

Belum lagi dengan meningkatnya kualitas dan kuantitas kejahatan transnasional yang meliputi kejahatan di bidang peredaran narkoba, money laundering, pembajakan, kejahatan ekonomi, cyber crime, trafficking in person, kejahatan konvensional dan kejahatan terhadap kekayaan Negara seperti korupsi, illegal logging, illegal fishing, illegal mining serta kejahatan-kejahatan lainnya.

"Menghadapi tantangan yang berat dalam upaya penegakan hukum itu, para pengemban fungsi Reserse dituntut untuk mampu melakukan percepatan penyidikan melalui penguasaan perundang-undangan, meningkatkan kemampuan taktik dan teknis penanganan jenis-jenis kejahatan, meningkatkan kemampuan penyelidikan dan penyidikan dan meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan instansi terkait," tegas Sutanto.

Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Polri, Makbul Padmanagara menghimbau seluruh jajaran Reserse agar mampu menjabarkan percepatan pencapaian sasaran prioritas kebijakan kapolri sesuai dengan tema Rakernis "Meningkatkan Kinerja Penyidik dalam Rangka Percepatan dan Kepastian Hukum".

Melalui Rakernis ini seluruh jajaran Reserse diharapkan agar lebih siap dan mempunyai visi yang sama dalam menghadapi berbagai tantangan tugas fungsi Reserse yang semakin kompleks, baik mengidentifikasi permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan tugas, mencari dan merumuskan solusi teknis maupun mencari langkah-langkah yang tepat guna terselenggaranya tugas fungsi Reserse yang optimal, professional dan akuntabel.

"Tema rakernis ini merupakan bentuk upaya dan semangat kita semua dalam upaya menjabarkan kebijakan bapak kapolri. Oleh karena itu sasaran yang ingin dicapai dalam rakernis ini antara lain agar kita lebih siap dan mempunyai visi yang sama dalam menghadapi

tantangan tugas fungsi reserse," kata Makbul.

Salah satu contoh gambaran penjabaran dan upaya percepatan penyidikan perkara yang diprioritaskan yang telah dilakukan oleh Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri dan jajaran fungsi reserse adalah upaya penindakan terhadap perjudian yang dampaknya kini telah dirasakan sangat signifikan oleh masyarakat.

Demikian juga halnya dengan kejahatan terorisme yang berdasarkan hasil penyelidikan selama ini telah terdeteksi menggunakan modus operandi adanya pengembangan system sel yang dilakukan oleh gembong teroris dan kelompok Noordin M Top dengan melakukan berbagai propaganda melalui penyebaran berbagai tulisan/buku, leaflet, maupun bahan-bahan lainnya yang disebarluaskan melalui teknologi informasi.

"Upaya penindakan harus dilakukan secara konsisten, kontinyu di seluruh wilayah. Selain itu perlu diwaspadai kegiatan mereka dalam upaya menghimpun dana melalui kejahatan pencurian dengan kekerasan, pemerasan dan sebagainya. Karena itu perlu ditingkatkan koordinasi petugas/penyidik harus saling berbagi informasi tentang *link* kelompok ini," himbau Makbul.

#### KASUS CIKANDE MERUPAKAN SUKSES POLRI

Keberhasilan dalam upaya mencegah dan menanggulangi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba juga telah menunjukkan kemajuan yang signifikan. Kendati demikian Bareskrim masih terus bekerjasama dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Badan Narkotika Daerah (BND), instansi terkait, LSM bahkan dengan kepolisian luar negeri untuk membongkar jaringan peredaran gelap narkoba di Indonesia.

Bahkan jajaran kepolisian secara terus menerus telah melakukan sejumlah upaya penindakan, mencari dan memusnahkan lahan ganja, produksi, laboratorium bahan dan narkoba, pemutusan jaringan, distribusi, pemasaran gelap narkoba di seluruh wilayah Indonesia.

Di satu sisi, pengungkapan pa-

brik/laboratorium gelap narkoba di Cikande Serang Banten dan di sejumlah tempat lainnya merupakan keberhasilan pengungkapan yang dilakukan Polri. Namun di sisi lain, pengungkapan ini sungguh merupakan keprihatinan bagi kita karena Indonesia kini nyata-nyata telah dimanfaatkan sebagai Negara produsen oleh sindikat internasional.

"Sebab itu berbagai upaya pencegahan, penindakan terhadap peredaran narkoba harus kita tingkatkan. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah upaya penyitaan asset dari hasil narkoba milik tersangka dan pengembangan penyidikan tindak pidana *money laundering* dari hasil kejahatan narkoba," tegas Makbul.

Dikatakan, dukungan dan harapan masyarakat luas terhadap pemberantasan korupsi juga sangat besar. Momentum ini tentu harus dimanfaatkan sebagai upaya meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada Polri. Seluruh jajaran kepolisian diharapkan agar lebih aktif proaktif meningkatkan kegiatan penyelidikan untuk "jemput bola" serta membangun koordinasi dengan BPK, BPKP, LSM dan kelompok masyarakat.

Menurut Makbul, penelusuran, pengejaran dan penyitaan asset dalam proses penyidikan kasus-kasus korupsi harus benar-benar dilakukan guna pengembalian kerugian Negara sebesar-besarnya agar mengurangi beban masyarakat yang ditimbulkan akibat tingginya beban ekonomi negara.

Begitu juga dengan berbagai kejahatan lainnya seperti ilegal logging, kejahatan penyeludupan buah, beras, gula pasir, mobil, pupuk, daging, elektronik, penyeludupan dan penimbunan BBM dan sebagainya kini telah ditangani Reskrim bekerjasama dengan unsur-unsur departemen terkait.

"Hal yang perlu saya tekankan disini, agar para Dirreskrim dan seluruh pengembalian fungsi reskrim untuk lebih intens dalam penanggulangan illegal logging. Segera pahami dan dalami modus-modus yang selama ini jarang tersentuh hukum seperti penebangan di luar

areal yang telah ditetapkan, penyalahgunaan dokumen SKSHH, IUP dan IPK," tandas Makbul.

Sementara berkaitan dengan kasus penyelundupan menurut Makbul, perlu dicermati kasus ekspor fiktif yang dapat terjadi di beberapa wilayah seperti yang baru saja terjadi di Jakarta dan berhasil diungkap jajaran Polda Metro Jaya. Disamping itu tentu perlu juga mengantisipasi berbagai kejahatan *transnasional crime* maupun kejahatan konvensional yang meresahkan masyarakat serta kerawanan di beberapa daerah akibat konflik sosial.

Memang, berdasarkan laporan hasil supervisi yang dilakukan penyidik utama Bareskrim Polri, di satuan Reserse kewilayahan masih ditemukan beberapa kelemahan dan permasalahan yang perlu ditanggulangi dan dicarikan solusi. Di antaranya masalah sarana dan perlengkapan ditemukannya berbagai keterbatasan sarana guna mendukung kegiatan penyelidikan dan penyidikan, khususnya di tingkat polsek-polsek.

Selain itu, pada jajaran reserse kriminal juga masih banyak ditemukan permasalahan sumber daya manusia (SDM, baik kualitas maupun kuantitasnya). Berbagai permasalahan ini perlu segera ditindak lanjuti dengan meningkatkan penyelenggaraan pembinaan personil secara berkelanjutan.

Kemudian sejumlah persoalan di atas diperparah oleh keterbatasan dibidang anggaran. Secara keseluruhan, dana penyidikan dirasakan masih sangat terbatas. Sementara dalam keterbatasan dana itu, jajaran reserse kriminal dihadapkan pada tuntutan pembiayaan dan volume kegiatan penyelidikan/penyidikan.

"Kita sadari memang keterbatasan itu memang harus ditindak lanjuti dan dicarikan solusi. Tetapi keterbatasan dana penyelidikan/penyidikan ini tidak ada alasan bagi reserse kriminal untuk memilah-milah atau tidak menangani tindak pidana. Bahkan sejak diterimanya laporan terjadinya sebuah peristiwa, reskrim wajib segera melakukan penyelidikan/penyidikan," tandas Makbul. [\*\*\*]

# Ajengan Bali

Balinese Cuisine



Rindu Masakan Bali?  
Jangan Khawatir, Kami ada disini...

SIAP MENERIMA PESANAN...



BETUTU AYAM / BEBEK



PLECING KANGKUNG



PLECING KACANG PANJANG



TUM / PEPES



BE SISIT

100%  
HALAL

Komp. Cibubur Times Square  
Jl. Raya Transyogi Km. 3  
Ruko Madison Blok B2 No. 12  
Telp. (021) 84302545

# Selamat dan Sukses

ATAS TERSELENGGARANYA

## Rakernis Reserse Polri 2006

**MENINGKATKAN KINERJA PENYIDIK  
DALAM RANGKA PERCEPATAN PENYIDIKAN  
DAN KEPASTIAN HUKUM**

**DIR RESKRIM  
POLDA MALUKU**

Drs WAHYU ADI  
KOMISARIS BESAR POLISI

**KAPOLRES METROPOLITAN  
JAKARTA UTARA**

Drs MUSYAFAK, SH, MM  
KOMISARIS BESAR POLISI

**KASAT NARKOBA  
POLRES METRO  
JAKBAR**

ASWIN SIPAYUNG, SIK  
KOMISARIS POLISI

**DIR RESKRIM POLDA SUMUT**

**BESERTA SELURUH JAJARAN DAN BHAYANGKARI**

Drs RONNY F SOMPIE, SH, MH  
KOMISARIS BESAR POLISI

**KASAT RESKRIM  
POLRES METRO  
JAKSEL**

SUYUDI ARIO SETO, SH, SIK  
KOMISARIS POLISI

**DIR RESKRIM  
POLDA BENGKULU**

Drs SOBRI EFENDI SURYA  
KOMISARIS BESAR POLISI

**DIR RESKRIM  
POLDA JAMBI**

Drs AR. ALLORANTE  
KOMISARIS BESAR POLISI

**KAPOLRES METROPOLITAN  
JAKARTA BARAT**

Drs EDWARD S PERNONG, SH  
KOMISARIS BESAR POLISI

**DIR RESKRIM  
POLDA NAD**

Drs SUEDI HUSEIN  
KOMISARIS BESAR POLISI

JAKARTA, 18 APRIL 2006